



HASIL EVALUASI BELUM KELUAR

# BUMD Kembali Sedot APBD

**PEKANBARU (HR)**-Meski banyak disorot karena dinilai belum bisa memberikan pemasukan untuk kas daerah secara maksimal, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah hampir bisa dipastikan kembali akan menyedot dana APBD Riau.

## NURMADI

Liputan Pekanbaru



Hal itu seiring kebijakan Pemprov Riau yang tetap menganggarkan penyertaan modal untuk sejumlah BUMD tersebut. Saat ini, rancangan Peraturan Daerahnya tengah disusun. Rencananya, penyertaan modal tersebut akan berlaku hingga lima tahun mendatang.

Perihal tentang penyertaan modal bagi BUMD di bawah lingkup Pemprov Riau itu dibenarkan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, Senin (8/9). Menurutnya penyertaan modal tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014.

...BUMD Hal 7

## BUMD... ✓

Dari Hal. 1

"PENYERTAAN modal yang kita rencanakan untuk BUMD selama lima tahun. Sudah dibuat kajiannya, Perdana juga sudah dipersiapkan, tapi masih dalam bahan mentah," terang Syahrial.

Dijelaskan Syahrial, penyertaan modal selama lima tahun itu bertujuan memenuhi kebutuhan BUMD terkait sektor yang saja yang akan dibisniskan. Selama perjalanan lima tahun tersebut, Pemprov Riau hanya tinggal menunggu hasil dari bisnis yang dijalankan oleh BUMD.

"Kita nantinya tinggal mendapatkan keuntungan deviden setiap tahunnya. Itu sudah kita prediksi, untuk pertumbuhan ekonomi

kita," terang Syahrial.

Ketika disinggung, berapa besar penyertaan modal yang dimasukkan oleh Pemprov Riau bagi BUMD Riau, Syahrial menyebutkan dirinya tidak tahu pasti berapa besar penyertaan modal itu. Karena dirinya saat ini sedang berada di Jakarta, menjalankan tugas. "Tak tahu pastinya berapa, nantilah setelah saya balek," ungkapnya.

### Masih Dievaluasi

Sementara itu, mengenai hasil evaluasi seluruh BUMD, Syahrial mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau.

Seperti dirilis sebelumnya, meski BUMD Riau telah

menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan laporannya ke Pemprov Riau, namun Pemprov Riau tidak mau menerima begitu saja. Karena itu, Pemprov Riau mengambil kebijakan dengan mengaudit laporan BUMD tersebut ke BPKP. Dengan cara ini, Pemprov Riau tidak lagi sekedar menerima laporan dari BUMD namun juga bisa mendapat gambaran dari pihak lain. Dari hasil audit itu, Pemprov Riau juga bisa mendapat gambaran, apakah sebuah BUMD betul-betul dikelola secara baik atau tidak dijalankan sama sekali, alias memeras uang dari APBD.

"Kita ingin yakin setiap BUMD diselenggarakan

dengan baik. Karena itu kita minta juga dilakukan audit oleh pihak BPKP," ujarnya.

Seperti dirilis sebelumnya, perihal suntikan untuk BUMD tersebut cukup marak disorot. Hal itu disebabkan, hasil yang diberikan BUMD untuk kas daerah, dinilai tak sebanding dengan anggaran yang telah disedot selama ini. Bahkan sejumlah kalangan menilai, untuk BUMD yang dinilai tak maksimal, sebaiknya ditutup saja.

Beberapa BUMD Riau tersebut antara lain PT Bank Riau Kepri, PT Bumi Siak Pusako, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT Pengembangan Investasi Riau, PT Sarana Penjaminan Riau dan PT Riau Air. \*\*\*